

Pendampingan Masyarakat sebagai Deteksi Dini Konflik Sosial dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kabupaten Tulungagung

Naibin,¹ Maftukhin,² Amrullah Ali Moebin,³ Edi Nurhidin,⁴ Ahmad Fahrudin,⁵

^{1,2,3,5}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ⁴Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

E-mail: ¹naibin44@gmail.com ²maftukhin@uinsatu.ac.id, ³amrullahtuban@gmail.com,

⁴dnurhidin@gmail.com, ⁵fahru.cendana@gmail.com

Article Info

Received: 20 Februari 2023

Revised: 23 Februari 2023

Accepted: 27 Februari 2023

Available online: 05 Maret 2023

Keywords:

Early Detection

Religious Moderation

Social Conflict

Abstract

This paper is to photograph diversity in the dimensions of conflict that occur in the Tulungagung community. The purpose of this paper is to provide community assistance as an early detection of social conflict in strengthening religious moderation in Tulungagung district. The approach used in this study is the ABCD (Asset-based Community Development) service method which aims to identify and utilize the potential and resources owned by local communities in reducing potential social conflicts that can arise due to differences in religious beliefs. The results of this community service found that it was important for the religious instructor (penyuluh agama) to understand the map of social conflicts to help them resolve these conflicts.

p_2775-345X / e_2775-3441 /
© 2020 The Authors. Published
by Academia Publication. Ltd
This is an open access article
under the CC BY-SA license.



To Cite this article:

Naibin, N., Maftukhin, M., Moebien, A.A., Nurhidin, E., Fahrudin., A. (2021). Pendampingan Masyarakat sebagai Deteksi Dini Konflik Sosial dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kabupaten Tulungagung. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 03 No. 01 Maret 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.57060/community.v3i01.81>

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian dari kehidupan, konflik juga sangat dekat dengan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, konflik masih kerap terjadi. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari konflik sosial, konflik agama ataupun konflik politik. Pada hakikatnya, konflik sangat wajar terjadi, apalagi dalam masyarakat yang sangat plural dengan perbedaan kelas sosial, agama dan lain sebagainya. Namun terkadang, konflik yang terjadi bersifat destruktif dan bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara, apalagi jika konflik itu terjadi dalam skala yang besar. Oleh karena itu, cara terbaik sebenarnya adalah dengan sebisa mungkin menghindari terjadinya konflik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah kemungkinan terjadinya konflik tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa pencegahan konflik adalah rangkaian kegiatan

yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem deteksi dini. Pasal 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam wilayah hukumnya mencegah terjadinya konflik dengan cara memelihara kondisi masyarakat yang damai, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, dan mengurangi potensi konflik serta membangun sistem peringatan dini. Dalam pencegahan konflik, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat. Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan hak otonomi agar daerah memiliki kewajiban untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. Bahkan, konsep ini kemudian dikenal sebagai CEWS (Sistem Peringatan Dini Konflik) dan pertama kali ditemukan selama Perang Dingin. Konsep CEWS digunakan oleh intelijen militer untuk memprediksi kemungkinan serangan rudal balistik musuh. CEWS menjadi salah satu konsep militer yang kemudian diperkenalkan oleh PBB sebagai sistem atau alat untuk memprediksi terjadinya bencana alam dan mendeteksi munculnya potensi konflik masyarakat yang tersembunyi. Di Indonesia, konsep peringatan dini atau sistem deteksi dini konflik sudah diterapkan dengan cukup baik. UNDP, melalui program Perdamaian Melalui Pembangunan di Indonesia, telah menemukan bahwa sistem deteksi konflik dini telah digunakan di beberapa daerah, bahkan perempuan memainkan peran kunci dalam proses program ini (Arnado:2012).

Di sisi lain, konsep kerangka dinamis dan resolusi konflik yang digagas oleh Malik juga merupakan upaya efektif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Tujuan dari konsep ini sama dengan unsur CEWERS, namun adanya pendekatan kearifan lokal merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah konflik, mengingat Indonesia adalah negara yang multietnis, berbeda agama, adat dan budaya (Malik:2013).

Praktik penanganan konflik dalam kerangka agama meliputi pemetaan potensi konflik, melakukan analisis konflik, mensintesa tindakan pencegahan konflik, penyelesaian konflik, penanganan konflik dan penanganan konflik, masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Melalui pengelolaan konflik dalam kerangka moderasi beragama, dapat dikembangkan model-model baru mengenai pandangan, sikap dan praktik keagamaan dalam rangka menjaga toleransi antar umat beragama. Semakin tinggi toleransi, semakin damai. Semakin moderat seseorang maka kemungkinan untuk menghindari konflik semakin besar. Karena indikator dari moderasi beragama salah satunya adalah toleransi dan anti kekerasan.

Deteksi konflik dini sejatinya bukan hal yang benar-benar baru. Ada banyak pelatihan, workshop dan artikel yang membahas mengenai deteksi dini konflik sosial. Misalnya terdapat penelitian terdahulu yang bisa menjadi pijakan dan dapat dikembangkan dalam tulisan ini, salah satunya adalah karya berjudul, *implementasi sistem deteksi dini dan resolusi konflik oleh pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial di Nusa Tenggara Barat* (Prihantoro, Hamidah: 2017) Terdapat artikel *Deteksi dini dalam penyelesaian konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh* (Razi, Khairulyadi: 2017). Yang menjadi pembeda dengan beberapa tulisan terdahulu adalah bahwa penelitian ini bukan hanya fokus pada deteksi dini konflik sosial saja, tapi juga dikaitkan dengan konteks moderasi beragama. Karena kami yakin bahwa terdapat hubungan erat antara deteksi dini konflik sosial dengan penguatan moderasi beragama.

Setiap daerah pasti memiliki potensi untuk terjadinya konflik sosial, demikian juga dengan kabupaten Tulungagung. Sekalipun kita tidak pernah berharap terjadi konflik di manapun dan dengan alasan apapun, tapi sebagai bentuk kewaspadaan, perlu kiranya untuk terus melakukan deteksi dini konflik sosial. Itulah mengapa perlu dilakukan pendampingan dalam melakukan deteksi dini konflik sosial.

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode ABCD (*Asset-based Community Development*) sebagai dasar melakukan observasi. Metode ini dimulai dengan penyelidikan apresiasi, yang merupakan model positif bagi suatu organisasi atau masyarakat bahwa mereka memiliki sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat organisasi bekerja dengan baik, bertahan, berhasil, efektif, dan ada hubungan yang sehat antara masyarakat (Salahuddin: 2015). Sebagai pijakan awal metode ini menekankan pada sisi positif yang dimiliki oleh masyarakat, selanjutnya dikembangkan dengan metode 5D:

Setidaknya ada lima langkah utama dalam proses pendampingan. Lima langkah utama ini meliputi: Pertama, *discovery* Tahap ini mengajak semua elemen untuk menemukan nilai-nilai positif atau prestasi. Wawancara atau observasi sebagai acuan untuk menemukan hal tersebut, tentunya berlaku pada patner pendampingan.

Kedua adalah *dream*. Ketika potensi sudah diketahui selanjutnya adalah merancang rencana yang segera diwujudkan cita-citanya. Tentu, dalam konteks aset yang telah ditentukan ini mimpi selanjutnya ialah menghasilkan masyarakat (penyuluh agama) yang sadar akan pentingnya penguasaan manajemen dan pemetaan konflik. Dengan kemampuan demikian rupa diharapkan para penyuluh agama lebih mengedepankan fakta daripada hoaks, karena itu sebagai data kebenaran meskipun itu hanya dari pengalaman dirinya sendiri, kedua, melancarkan kampanye hidup damai, moderasi, dan toleransi dengan sesama manusia.

Ketiga *design*. Langkah selanjutnya adalah mendesain proses. Suatu komunitas telah menemukan potensi untuk berkembang, arah pertumbuhan juga telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah merancang apa yang harus dilakukan. Dalam konteks penyuluh Tulungagung yang telah dibahas di atas, proses perancangan berupa perencanaan untuk mengadakan pelatihan, dimana pelatihan adalah transfer informasi, transfer keterampilan berbasis pengalaman individu (Natsir, dkk: 2020). Keempat yaitu *Define*. Pada tahap ini bekerja untuk mengidentifikasi subjek aktif. Dalam hal ini, topik utamanya adalah kampanye moderasi beragama. Artinya, kajian deteksi dini konflik sosial ini juga mencakup bagaimana partisipan menghadapi problem di masyarakat secara damai, bersahabat, toleran, dan anti kekerasan. Kelima yaitu *Destiny*. Pada tahapan ini berupa aksi nyata tindakan salah satunya adalah melalui pelatihan itu sendiri (Natsir, dkk: 2020).

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Menurut sejarahnya, Tulungagung merupakan daerah kecil yang terletak di sekitar alun-alun (pusat kota). Tempat ini disebut Tulungagung karena merupakan mata air besar – dalam bahasa Kawi, tulung artinya mata air, dan agung artinya besar. Wilayah yang lebih luas disebut Ngrowo. Ngrowo sendiri tetap digunakan hingga sekitar awal abad ke-20, ketika pusat ibu kota dipindahkan dari Kalangbret ke Tulungagung. Pada tahun 1205 M, menerima penghargaan dari Raja Daha yang terakhir yaitu Kertaja. Penghargaan ini tercatat dalam prasasti Lawadan dengan bulan sengkala

"Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" mengacu pada tanggal 18 November 1205 M dan tanggal tersebut merupakan hari jadi Tulungagung sejak tahun 2003 M.

Wilayah kabupaten Tulungagung terletak pada ketinggian kurang lebih 85 m diatas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Kabupaten Tulungagung memiliki dataran rendah, sedang dan tinggi dengan struktur datar, perbukitan dan pegunungan. Dataran merupakan daerah di bawah 500 mdpl, terdapat di sebagian besar wilayah Kabupaten Tulungagung kecuali Kecamatan Pagerwojo dan Kabupaten Sendang Tulungagung, dimana hanya terdapat 4 desa dataran rendah. . Dataran tengah pada ketinggian 500-700 mdpl terdiri dari 6 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 5 desa di Kecamatan Sendang. Dataran tinggi di atas 700 mdpl meliputi 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas wilayah yang meliputi: Barat dengan Kabupaten Trenggalek, Utara dengan Kabupaten Kediri, Timur dengan Kabupaten Blitar, Indonesia,. Luas wilayah kabupaten Tulungagung mencapai 1.055,65 km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan, 271 desa dan 14 kelurahan.

Kondisi Sosial Keberagamaan di Tulungagung

Indonesia dikenal sebagai negara religius atau negara religius. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih tersisanya keragaman dalam ritual keagamaan yang masih ada hingga saat ini. Memang, sebelum pemerintah Indonesia secara resmi mendeklarasikan agama-agama (Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha), banyak kelompok pemeluk yang tinggal di berbagai belahan nusantara (Aksin:2015). M. Imron Rosadi menjelaskan bahwa di Tulungagung ada berbagai aliran kepercayaan yang lahir sebelum agama-agama yang diresmikan pemerintah lahir. Lanjut ia memaparkan ada lebih dari 23 aliran kepercayaan yang ada di Tulungagung, diantaranya Jawa Dipa, Sapta Dharma, Sumarah, Pangestu dan kelompok serupa yang tergabung dalam Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Rosadi:2018).

Data dari pusat statistik kabupaten Tulungagung didapat sebaran pemeluk agama yang mayoritas didominasi oleh pemeluk Islam, selanjutnya disusul oleh Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan penganut kepercayaan. Sebagaimana bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Pemeluk Agama di Tulungagung

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Besuki	40 190	360	25	29	-	-
Bandung	79 004	81	2	-	-	-
Pakel	55 287	62	-	-	-	-
Campurdarat	56 295	98	45	35	-	2
Tanggunggunung	26 452	-	-	-	-	-
Kalidawir	74 893	128	-	-	-	-
Pucanglaban	30 092	28	-	-	2	-
Rejotangan	81 678	349	125	1	-	-
Ngunut	78 194	1 169	2 414	25	208	-
Sumbergempol	73 660	62	-	-	-	-
Boyolangu	85 918	307	-	10	4	-
Tulungagung	63 803	4 286	2 676	697	408	4
Kedungwaru	93 474	2 478	803	35	48	-
Ngantru	60 998	296	28	10	-	19
Karangrejo	45 961	68	-	-	-	-
Kauman	54 150	432	11	5	-	-
Gondang	54 382	187	6	-	5	-
Pagerwojo	33 018	77	21	-	-	-
Sendang	53 311	802	1	-	-	-
Tulungagung	1 140 760	11 270	6 157	847	675	25

Sumber: Badan Pusat Statistik Tulungagung

Pada observasi lapangan peneliti menemukan keberagaman aliran-aliran Islam, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ahmadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Salafi Wahabi. Hubungan keberagaman antar ormas Islam di Tulungagung sendiri bisa dikatakan tidak berjalan baik, sepuluh tahun terakhir banyak terjadi gesekan-gesekan antar ormas Islam. Sebagaimana pada

tahun 2016 terjadi gesekan antara ormas MUI dengan Ahmadiyah. Pada tahun 2020 terjadi gesekan antara Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme (AMAR). Massa AMAR yang terdiri dari Pemuda Pancasila, Pagar Nusa, GP Ansor, BANSER, LPKAN, APN, PGN, PMII, Karang Taruna, IPNU, Fatayat NU, Gusdurian dengan Salafi Wahabi.

Selain konflik internal pada ormas Islam, di Tulungagung juga pernah terjadi konflik antara ormas Islam dengan aliran Bahai. Ditambah lagi konflik dengan aliran kepercayaan di daerah Gunung Budeg, penolakan dari orang-orang aliran kepercayaan (kejawen) atas pendirian wisata religi dikawasan tersebut. Dan masih banyak konflik-konflik lainnya yang tidak terekspose oleh media.

Dilihat dari fakta tersebut perlu adanya penanganan yang serius dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat sipil untuk melakukan pendampingan-pendampingan secara intens. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi atau kampanye damai (hidup berdampingan) atau melakukan kampanye sosialisasi moderasi agama disemua lini sebagaimana pengabdian yang dilakukan peneliti. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup rukun, damai, dan bergandengan antar elemen masyarakat.

Menanamkan dan memupuk rasa persaudaraan lewat FGD moderasi agama inilah yang memang harus sering dilakukan oleh semua masyarakat. Bahkan bisa digaris bawahi bahwa moderasi beragama harus bisa menjadi ruh bagi kehidupan beragama di Indonesia, khususnya di Tulungagung yang terkenal dengan keberagamaan agama dan kepercayaan masyarakatnya.

Deteksi Dini Konflik Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama

Konflik sosial adalah kericuhan baik verbal atau dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok masyarakat yang berlangsung lama dan berdampak luas yang menimbulkan ketidakamanan, perpecahan sosial, mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik tidak bisa dihindarkan dan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Asumsi ini bertentangan dengan fakta bahwa manusia diciptakan berbeda untuk saling mengenal. Secara historis perbedaan ini dimulai sejak awal keberadaan manusia. Kegagalan untuk menangani perbedaan akan menyebabkan konflik antara orang-orang. Dalam hal perselisihan, masing-masing pihak mengklaim sebagai yang paling benar, paling baik, paling religius, paling hebat.

Perlu digaris bawahi bahwa konflik memiliki dua sisi, potensi risiko dan manfaat. Dalam hal perubahan, konflik adalah bagaimana sebuah keluarga, komunitas, dan masyarakat berubah. Konflik juga dapat mengubah pemahaman orang satu sama lain dan mendorong mereka untuk memobilisasi sumber daya dengan cara baru. Konflik membawa masyarakat ke titik mengklarifikasi pilihan dan kekuatan untuk menemukan solusi.

Pemahaman terhadap terjadinya konflik harus jelas terlebih dahulu karena hal ini akan mempengaruhi cara pandang dalam menilai konflik tersebut. Pada tahap ini, konflik dipengaruhi oleh pola emosional, kepribadian, dan budaya. Konflik atas gaya pribadi seseorang atau kelompok. Reaksi psikologis (bermimpi, berkelahi, dingin/diam) memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi proses konflik. Budaya juga membentuk aturan dan ritual yang bertentangan dengan kelompok masyarakat.

Adapun wujud konflik bisa diklasifikasikan menjadi tiga. **Konflik Laten:** ada ketegangan-ketegangan yang tidak tampak, belum berkembang secara utuh, dan belum mencapai klimaks konflik. Seringkali salah satu atau kedua belah pihak mungkin tidak menyadari potensi konflik yang

paling potensial. **Konflik Mencuat:** para pihak yang bertikai diidentifikasi. Mereka mengakui ada perselisihan, sebagian besar masalah sudah jelas, tetapi proses negosiasi dan penyelesaian masalah belum berjalan. **Konflik Terbuka:** Para pihak yang bersengketa secara aktif terlibat dalam perselisihan, mungkin telah memulai negosiasi, dan mungkin juga menemui jalan buntu. Sedangkan lima level konflik bisa dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2. Level Konflik



Pada tahapan penyelesaian deteksi dini konflik. **Negative/Positive Peace** yang diperkenalkan oleh Johan Galtung, seorang Sosiolog dan Matematikawan dari Norwegia yang dijuluki sebagai *The Father of Peace Studies*. Menurutnya, perdamaian negatif adalah tidak ada konflik, tidak ada ketidakadilan sosial, tidak ada kekerasan, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada penindasan ekonomi. Jika indikator-indikator negatif ini banyak ditemukan di masyarakat, maka masyarakat di wilayah tersebut lebih cenderung mengalami konflik. Berikut adalah beberapa indikator perdamaian negatif terkait dengan dua dimensi indeks agama. Dalam melihat potensi-potensi konflik keagamaan dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya.

Tabel . 2 Dimensi Keagamaan

DIMENSI KEAGAMAAN	
Negative Peace	Positive Peace
Ada siklus periodik konflik sosial dengan dimensi agama	Ada pranata sosial dan adat istiadat yang membantu meredam konflik sosial dengan aspek agama
Ada ormas/kelompok agama yang menganggap sesat/kafir dari beberapa agama	Kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum dalam mengelola konflik sosial yang berdimensi agama
Adanya politisasi agama	Ada kegiatan ormas keagamaan untuk meredakan masalah konflik sosial yang berdimensi keagamaan.

Adanya diskriminasi sosial terhadap pemeluk agama tertentu	Adanya khutbah/ceramah/edukasi yang mengajarkan penghormatan dan perlindungan antar pemeluk agama
Adanya preferensi kegiatan sosial dan ekonomi hanya dengan interumat beragama	Adanya khutbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan penghormatan dan perlindungan interumat beragama

Dari tabel di atas keadaan bisa disimpulkan bahwa ketika di suatu daerah sering terjadi tindakan-tindakan mengarah pada *negative peace* maka perlu adanya perhatian khusus untuk *mapping* potensi konflik sebagai dasar untuk deteksi dini konflik. Sebaliknya, ketika di suatu daerah banyak kegiatan warga yang mengarah para *positiv peace*, kewajiban masyarakatnya adalah menjaga dan terus merawat serta mengampanyekan secara masif sehingga terbentuk cara pandang yang *open minded* disemua lapisan masyarakat.

Semua data penting yang didapatkan selama proses pengabdian ini dari observasi, pelaksanaan FGD Sharing dan Mapping terjadinya konflik sosial, FGD Bimbingan Teknis aktor dalam penyelesaian konflik bisa dijadikan buku pegangan atau pedoman bagi penyuluh kementerian agama atau tokoh-tokoh ormas yang ada di Tulungagung.

Bagi penyuluh kemampuan memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadi konflik dan membantu menyelesaikan atau meredam sebelum konflik itu terjadi menjadi suatu agenda yang wajib menjadi perhatian bersama. Dalam hal ini, semua penyuluh kementerian agama di Kabupaten Tulungagung harus lebih intens *sharing* informasi terkait dengan kejadian apapun yang ada di wilayah kecamatan masing-masing, sehingga dapat diperoleh atau saling tukar informasi tentang konflik yang terjadi dan *problem solving*nya.

Sedangkan bagi tokoh ormas agama yang menjadi pioner yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah. Jadi tugas utamanya tidak hanya berdakwah tentang ajaran-ajaran agamanya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mendidik umatnya agar lebih dewasa dalam bermasyarakat. Tentu dalam hal ini tokoh agama harus bisa memberikan wawasan kebangsaan dan lebih mengedepankan hidup berdampingan secara damai antar umat lainya atau kelompok masyarakat lainnya.

Sebagai penutup pengabdian berkeyakinan bahwa moderasi agama harus menjadi ruh dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi acuan dalam mewujudkan kedamaian. Menjadi dasar dalam mendidik masyarakat lebih dewasa dalam hidup bermasyarakat.

KESIMPULAN

Penguatan moderasi beragama melalui pelatihan *focus froup discusion* deteksi dini konflik memang layak untuk dilaksanakan. Paling tidak ada dua alasan yang melatar belakangi kegiatan ini begitu pas diselenggarakan saat ini di Tulungagung. *Pertama*, butuhnya mapping wilayah-wilayah yang rawan terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh agama di Tulungagung. *Kedua*, penyuluh kementrian agama dan tokoh ormas Islam di Tulungagung merupakan orang yang pertama kali bersinggungan dengan masyarakat, sehingga penting untuk didampingi dan diberikan yang lebih mendalam tentang penguatan moderasi agama.

Pelaksanaan pengabdian melalui pelatihan deteksi dini konflik sosial sebagai penguatan moderasi beragama telah diadakan pada bulan September – Desember tahun 2022. Kegiatan ini terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu: (1) Observasi berupa pengambilan informasi mengenai data-dada dan calon peserta, lokasi, pemilihan fasilitator, pelaksanaan kegiatan; (2) Pelaksanaan kegiatan FGD. FGD dilaksanakan dua kali pada bulan September-Desember 2022 setelah pelaksanaan observasi. Pelaksanaannya terdiri dari persiapan, pembukaan, penyampaian materi, sharing, kemudian diakhiri dengan penutupan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan pihak-pihak terkait yang telah berperan dalam membantu kegiatan pengabdian ini berlangsung.

DAFTAR REFERENSI

- Natsir, A., Rahmawati, A., & Nitasari, E. A. (2020). Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pengajaran Alquran Melalui Pelatihan Manajemen Madrasah Diniyyah di Dusun Selungguh Kabupaten Magetan. *Inej: Indonesian Engagement Journal*, 1(1).
- Natsir, A., Muzakki, H., & Daroini, M. (2020). Posdaya Berbasis Pesantren: Pelatihan Manajemen Madrasah Dan Pengelolaan Kelas Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an "Hasan Munadi Pohsawit" Ponorogo. *Inej: Indonesian Engagement Journal*, 1(2).
- Wijaya, A. (2015). *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai Di Nusantara*. Nadi Pustaka.
- Arnado, M. A. M. (2012). Women's Involvement In Conflict Early Warning Systems: Moving From Rhetoric To Reality in Mindanao. *Centre for Humanitarian Dialogue*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2017
- Razi, F., & Yadi, K. (2017). Deteksi Dini Dalam Penyelesaian Konflik Oleh Kesbangpol Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(4).
- <https://kabar.tulungagung.go.id/profil/> diakses pada tanggal 15 September 2022 Jam 15.00 WIB
- Malik, I. (2013). Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik.\
- Rosadi, M. I. (2015). Eksistensi Dan Ajaran Kelompok Penghayat Kaweruh Jawa Dipa Di Tulungagung. *Dinamika Penelitian: Jurnal Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(1), 67-80.
- Prihantoro, M., & Hamidah, A. (2017). Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Konflik Sosial Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013). *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Juni, 3, 77-104.
- Salahuddin, N. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya Asset Based Community-Driven Development (ABCD)*.
- Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.